

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI DAN KEUANGAN INDONESIA

Violla Marchella¹, Nelly Helda Yanti², Cahaya Iklima³
viollamarchella54@gmail.com¹, nellyheldayanti207@gmail.com²,
cahayaiklima59@gmail.com³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Abstrak

Negara Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan juga spiritual. Sebagai Negara yang memiliki tujuan dan strategi, Indonesia menerapkan banyak hal yang harus dikerjakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang matang disertai dengan pemerataan pembangunan yang tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. BUMN merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional. Perbankan sebagai salah satu BUMN dalam melaksanakan operasionalnya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, akan tetapi harus mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini tegas tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

Kata Kunci : Bank, Pembangunan Nasional

Abstract

Indonesia as a developing country aims to achieve a fair and prosperous society, evenly material and also spiritual. As a country with a goal and strategy, Indonesia is implementing a lot of things to do to improve Indonesia's mature economy along with equitable development spread throughout the archipelago. BUMN is one of the national economy drivers. Banking as one of the State enterprises in implementing its operations is not solely to seek profit, but should support the Government's efforts in enhancing the national economy. It is expressly stated in article 4 of the Republic of Indonesia Law number 7 year 1992 concerning banking mentions: "Indonesia's banking aims to support national development implementation in order to improve equitable, economic growth, and national stability toward the enhancement of many people's welfare."

Keywords : Bank, national development

PENDAHULUAN

Bank Indonesia atau dulu disebut dengan De Javasche Bank adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Peran Bank Indonesia yang paling mendasar adalah mencetak dan mengedarkan uang. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang kepada masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara.

Dengan peran seperti ini, wajar apabila Bank Indonesia mempunyai tujuan dan diberi tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang diedarkan tersebut. Terlebih pada dunia modern seperti sekarang dimana uang sebagai fiat money, dalam arti bahwa negara memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia untuk mencetak dan mengedarkan uang tersebut atas dasar kepercayaan. Karena itu, kestabilan nilai dari

mata uang tersebut merupakan kewajiban mendasar bagi Bank Indonesia agar kepercayaan negara dan masyarakat dapat terpelihara.

Dalam praktiknya, salah satu kestabilan nilai dari mata uang yang dimaksud adalah kestabilan terhadap mata uang negara lain (yang diukur dan tercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs mata uang). Kestabilan nilai mata uang, dalam hal ini adalah nilai tukar (kurs) sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

METODOLOGI

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Bank Indonesia dalam menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar di Indonesia. Objek Penelitian adalah apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian dengan persoalan sekiranya perlu pemahaman agar dapat menentukan sebuah penelitian yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah metode pengumpulan, penyajian data, peringkasan, sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alami dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang sedang terjadi dan dilakukan dengan jalan metode yang ada. Adapun jenis data penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang telah diperoleh secara langsung dari sebuah objek yang dikaji atau diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Dalam pengertian sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk tambahan modal. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, mengirimkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, Pajak Bumi dan Bangunan, uang kuliah, gaji, dan pembayaran lainnya.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Usaha bank tidak semata-mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung-jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil guna bagi kepentingan masyarakat.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan, memelihara dan menjaga kestabilan kurs Rupiah. Hal ini tercermin pada tingkat inflasi yang stabil dan rendah. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga BI Rate sebagai salah satu instrumen utama dari kebijakan moneter. Pada dasarnya Mekanisme transmisi kebijakan moneter menunjukkan tindakan Bank

Indonesia melalui perubahan-perubahan instrument moneter dan target operasionalnya dalam mempengaruhi berbagai variable ekonomi dan keuangan, dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada tujuan akhir, yaitu inflasi. Berubahnya nilai BI rate dapat mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, beberapa diantaranya yaitu, jalur kredit, jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur harga asset dan juga jalur ekspektasi.

Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan

Dikatakan di dalam Undang-Undang Bank Indonesia dalam Pasalnya yang ke 4 ayat (1) "secara umum dinyatakan bahwa Bank ialah suatu lembaga keuangan yang merupakan lembaga bisnis utama dalam sumber perekonomian suatu negara, dengan demikian adanya sebuah lembaga bank akan menimbulkan berbagai macam masalah. Keikutsertaan Pemerintah dalam mengawasi secara ketat segala bentuk perubahan maupun perkembangan yang terjadi dalam ranah perbankan. Keberadaan bank akan dipaparkan menjadi sebagai salah satu sebuah lonjakan penggerak bidang perekonomian nasional."

Ketentuan jelas dinyatakan pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 di Tahun 1999 "mengenai Bank Indonesia yang direvisi ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan bahwa BI berganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memberikan sebuah pembentukan suatu lembaga pengawas dalam jasa keuangan yang akan meliputi sektor perbankan, perasuransian, dana pension masyarakat, sekuritas, modal ventura, serta mengenai pembiayaan sampai ke badan penyelenggara dana dari masyarakat.

Utumo menyebutkan "Otoritas Jasa Keuangan terbentuk dikarenakan adanya suatu perkembangan dari sebuah industri sektor jasa keuangan di Indonesia, inti permasalahan sektor industri jasa keuangan dan tersampaikan melalui Undang-Undang di Nomor 3 pada Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang pada Nomor 23 di Tahun 1999 BI adalah respon dari krisis yang melanda Asia yang terjadi di Tahun 1997-1998 berdampak begitu berat pada Indonesia." "krisis di Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia berakibat banyak bank yang mengalami koleps yang menimbulkan pertanyaan bagaimana tugas dari Bank Indonesia. Kelemahan pengaturan yang tidak mendukung harus segera diperbaiki agar menimbulkan sebuah sistem keuangan yang harus lebih tangguh terhadap goncangan ekonomi."

Maka timbulah sebuah kesepakatan suatu lembaga yang menggantikan tugas dari Bank Indonesia dalam mengawasi bank. Tugas, fungsi serta wewenang dari BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan sepenuhnya akan dialihkan kepada OJK. Peralihan termuat pada Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 di Tahun 2011 dimulai pada 31 Desember 2012 segala fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan dari kegiatan jasa keuangan yang meliputi sektor Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Permodalan lainnya akan beralih dari awalnya Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kemudian sepenuhnya dialihkan ke OJK. Dan semenjak tanggal 31 Desember 2013 seluruh fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan diambil alih dari BI ke OJK.

Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil

Stabilitas nilai rupiah yang menjadi tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia adalah stabilitas harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Menurut pendekatan moneter, inflasi dapat terjadi karena terlalu banyaknya uang

yang beredar dibandingkan dengan keinginan masyarakat untuk memiliki dan menyimpan uang. Lenner menjelaskan inflasi sebagai suatu keadaan ketika terjadi kelebihan permintaan atas barang dan jasa secara keseluruhan.

Secara makroprudensial, fungsi Bank Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap sistem perbankan secara menyeluruh. Sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah mengatur dan mengawasi bank secara individual. Apabila terdapat penyimpangan atau potensi risiko pada sistem perbankan yang ditemukan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi permasalahan sistemik tersebut.

Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas (atau menyebabkan kenaikan harga) ke barang lain. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penetapan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memantau perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, pasar tradisional dan pasar modern untuk beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota.

Kestabilan Sistem Keuangan

Pasar keuangan dan sektor perbankan berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Bengtsson Money Market Funds (MMFs) menganggap pasar keuangan berperan penting dalam mempengaruhi sektor perbankan pada saat krisis dalam menjaga stabilitas keuangan. Krisis global yang melanda Amerika tahun 2008 terjadi karena terganggunya stabilitas sistem keuangan yang disebabkan oleh kegagalan pasar keuangan dan perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat. Sektor perbankan berperan dalam stabilisasi tingkat pertumbuhan dan persediaan uang dalam perekonomian. Upaya reformasi kestabilan keuangan dimulai dari sistem perbankan. Upaya untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan, sektor perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi dalam mengalokasikan dana masyarakat yang berhasil dihimpun pada berbagai sektor untuk investasi. Lembaga perbankan juga bertindak sebagai magnet bagi siklus bisnis. Maka tingkat kestabilan sistem keuangan bergantung pada kinerja perbankan. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong kestabilan sistem keuangan.

Di Indonesia perbankan dikenal sejak tahun 2002. BI memberikan cetak biru pengembangan perbankan sebagai pedoman operasi perbankan di Indonesia. BI secara resmi mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang perbankan, yang semakin memperkuat posisi perbankan dalam mengembangkan sektor keuangan nasional. Sistem perbankan yang diterapkan oleh BI adalah dual banking system. Dalam cetak biru tujuan utama pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, arah visi misi dan tujuan perbankan syariah nasional sebagai peningkatan mobilitas perekonomian nasional, kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat bersama.

Keterlibatan Bank sentral akan menjaga stabilitas sistem keuangan sebenarnya dimulai ketika Bank sentral mencetak uang kertas (Banknote) setelah ditinggalkannya uang kertas yang berbasis komoditas seperti emas dan perak. Peran ini makin tinggi setelah simpanan dana dalam sistem perbankan telah melampaui jumlah uang kertas yang beredar. Perkembangan ini membuat peran bank sentral lebih besar dalam menjaga kestabilan sistem keuangan suatu Negara. Dengan

demikian keterlibatan bank sentral dalam menciptakan dan menjaga stabilitas sistem keuangan merupakan tugas mendasar dan peran ini tidak boleh dipisahkan dari kebijakan bank sentral Indonesia.

Tugas baru di bidang stabilitas sistem keuangan tersebut dinyatakan baik secara implisit maupun eksplisit dalam tujuan, misi atau tugas bank sentral. Ditingkat global, beberapa bank sentral negara Eropa mendirikan organisasi non profit: Financial Stability Forum pada April 1999 sebagai respon atas krisis Asia 1997-1998. FSF beranggotakan hampir seluruh bank sentral, departemen keuangan, otoritas pengawasan keuangan di dunia. FSF bertujuan mempromosikan pentingnya stabilitas keuangan dalam skala internasional. Sementara itu, IMF bekerjasama dengan World Bank mengeluarkan program Financial Sector Assessment Program yang bertujuan menilai kestabilan sistem keuangan disuatu negara.

Saat ini belum ada mekanisme baku tentang bagaimana mekanisme penggunaan dana publik untuk membiayai krisis. Kita memerlukan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis baik untuk pencegahan maupun penanganan krisis. Saat ini yang dipergunakan adalah Perppu Nomor 4/2008 tentang JPSK. Mengingat penanganan krisis memerlukan payung undang-undang maka peran DPR sangat menentukan. Menurut Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Seluruh fungsi tersebut terkait dengan penyelesaian krisis ekonomi global yang mulai mempengaruhi Indonesia. Fungsi legislatif diperlukan untuk membuat undang-undang sebagai payung hukum dalam penyelesaian krisis, sehingga krisis dapat diselesaikan dengan baik, tanpa menimbulkan masalah-masalah hukum di kemudian hari. Sementara fungsi anggaran diperlukan ketika untuk penanganan krisis pemerintah harus menggunakan dana publik.

Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu yakni, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.

Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.

Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR).

Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makro prudential dengan instrumen yang telah ada. Bank Indonesia akan menjalankan suatu kebijakan untuk melihat bagaimana proses kebijakan moneter bisa terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan suatu permasalahan secara

makro ekonomi. Namun banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari persoalan mikro ekonomi seperti asuransi yang sangat berpengaruh dengan perekonomian dan sebagai control yang lebih jelas, dibuatlah lembaga yang memantau kebijakan moneter dengan fungsi mikro prudential yang sudah dibentuk yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berkolaborasinya Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan, tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil. Masyarakat juga lebih dimudahkan dalam memberikan pertanyaan dan bisa diselesaikan segala permasalahan keuangan hingga ke bagian yang terkecil. Saat ini, efektifitas kedua lembaga ini, sangat mampu untuk membantu hingga pada lapisan terkecil baik kabupaten dan kota. Namun untuk menjangkau hingga ke pelosok daerah secara signifikan, masih diperlukan sosialisasi secara lebih intensif. Dengan dilakukan sosialisasi secara intensif, maka akan membuat masyarakat dapat optimal mengendalikan sistem keuangan.

Patut ditambahkan pula bahwa kesuksesan restrukturisasi perbankan itu sendiri juga tergantung kepada terciptanya situasi dan kondisi makroekonomi yang stabil dan keberhasilan langkah restrukturisasi di sektor riil. Pengalaman di negara-negara yang melakukan penyehatan perbankan dalam kondisi laju inflasi yang tinggi, misalnya, sering menghadapi gangguan terutama berupa proses disintermediasi di dalam sistem perbankan. Merosotnya kepercayaan kepada keamanan sistem perbankan mengakibatkan mobilisasi dana oleh perbankan dapat mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga mengancam kehidupan bank yang pada dasarnya amat tergantung atas sumber dana dari masyarakat. Demikian pula bila kemacetan dan kerusakan yang dialami di sektor riil terus berlangsung, kinerja perbankan dalam mencapai keuntungan akan terganggu meskipun proses penyehatan bank telah dilakukan secara cermat.

Adanya saling keterkaitan ini menunjukkan bahwa rancang bangun dan strategi restrukturisasi perbankan tidaklah cukup bila hanya memperhitungkan aspek mikro penyehatan bank saja. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kesuksesan restrukturisasi perbankan akan tergantung pula kepada konsistensinya dengan upaya menjaga kestabilan moneter. Konsistensi ini akan semakin diperlukan bila strategi restrukturisasi perbankan akan melibatkan dana/subsidi pemerintah ataupun bank sentral dalam jumlah yang terkadang sangat besar.

Walaupun dari sudut mikro penyediaan dana ini berdampak positif kepada penyelesaian masalah perbankan, secara makroekonomi hal tersebut kemungkinan akan dapat menimbulkan konflik dengan upaya menjaga kestabilan moneter dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, trade-off yang muncul merupakan suatu hal yang perlu dicermati agar restrukturisasi perbankan dapat berjalan dengan baik sementara kestabilan makroekonomi dan pemulihan perekonomian dapat dicapai.

Kekuatan finansial adalah kondisi di mana ekonomi suatu negara berada dalam keadaan yang layak dan stabil tanpa menghadapi perubahan tajam atau keadaan darurat yang serius. Hal ini digambarkan dengan tingkat ekspansi yang masuk akal, tingkat pengangguran yang umumnya rendah, dan perkembangan keuangan yang didukung. Pada saat kondisi keuangan terjaga, individu dapat merasa lebih yakin untuk berkontribusi, membelanjakan uang, dan menghadapi tantangan moneter lainnya. Organisasi juga umumnya akan lebih cenderung merekrut lebih banyak spesialis dan mengembangkan bisnis mereka, karena ada keyakinan bahwa ekonomi akan berjalan dengan baik.

Kekuatan finansial juga berperan penting dalam mengupayakan bantuan pemerintah yang bersahabat, mengurangi kesenjangan moneter, dan mengurangi tekanan pada strategi pemerintah. Selain itu, kekuatan finansial memungkinkan pemerintah negara untuk menjalankan strategi moneter dan strategi yang berhubungan dengan uang dengan lebih sukses, karena mereka dapat lebih siap menghadapi perubahan finansial yang mungkin terjadi.

Indikator Moneter dan Peran dalam Mengatasi Stabilitas Ekonomi

Strategi terkait uang adalah salah satu instrumen utama yang diklaim oleh bank nasional untuk mengatasi kekuatan moneter suatu negara. Tugas utama dari pengaturan keuangan adalah untuk mengontrol pasokan uang tunai dan biaya pinjaman untuk mempengaruhi tingkat ekspansi, perkembangan moneter, dan tingkat pengangguran. Dengan tujuan akhir untuk memperkuat ketergantungan moneter, bank-bank nasional biasanya memiliki target utama untuk mencapai ekspansi yang rendah dan stabil, akibatnya memajukan lingkungan keuangan yang solid dan dapat didukung.

Siklus dinamis pengaturan terkait uang mencakup pemeriksaan dari atas ke bawah atas keadaan keuangan saat ini, proyeksi masa depan, serta penilaian dampak dari strategi yang baru saja dijalankan. Bank nasional bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan keuangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, misalnya, strategi biaya pinjaman, aktivitas pasar terbuka, dan tingkat simpanan yang diperlukan bank. Meskipun demikian, dalam memperkuat kesehatan keuangan, strategi yang berhubungan dengan uang juga dihadapkan dengan berbagai kesulitan.

Perubahan keuangan yang mengejutkan, kerentanan di seluruh dunia, serta perubahan perilaku pelanggan dan pembuat dapat mempengaruhi kelangsungan pendekatan terkait uang. Demikian juga, karakteristik yang timpang antara pendekatan terkait uang dan pendekatan keuangan, serta efek sosial dan distribusi dari strategi juga menjadi pertimbangan signifikan dalam menjaga stabilitas moneter secara umum.

Strategi terkait keuangan bertujuan untuk membangun lingkungan usaha yang menguntungkan dan memberdayakan pergerakan keuangan yang bermanfaat. Dengan menetapkan biaya pembiayaan yang tepat, bank nasional dapat menyegarkan usaha korporasi dan pemanfaatan publik, akibatnya memperluas minat total dan mendorong perkembangan moneter. Kemudian lagi, pendekatan yang berhubungan dengan uang juga dapat mengubah biaya pinjaman untuk menahan ekspansi ketika ekonomi berkembang dengan cepat, dengan cara ini mencegah efek samping dari "overheating" dan melonggarnya gelembung sumber daya yang sebenarnya dapat membahayakan kekuatan jangka panjang.

Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. Tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertumbuhannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kekurangan modal, dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering kali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank Sentral. Jika ini, dilakukan laju pertumbuhan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. Kedua, Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor).

Pertumbuhan inflasi dan BI Rate jauh lebih baik. Hal ini tidak semata-mata hanya dikarenakan oleh terkendalinya Rupiah dan pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga karena disokong oleh pertumbuhan ekonomi global yang membaik. Harga-harga bahan pokok sudah tidak lagi mahal dan harga BBM bersubsidi sudah kembali normal, meskipun tarif angkutan umum tidak mengalami penurunan. Turunnya tingkat inflasi diikuti dengan penurunan BI Rate sehingga akan menyebabkan tingkat suku bunga kredit turun dan secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kredit kepada bank, khususnya kredit UMKM.

KESIMPULAN

Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan nilai rupiah dan mendukung pembangunan ekonomi. Tugas utama BI mencakup pencetakan dan pengedaran uang, serta pengaturan kebijakan moneter untuk menstabilkan inflasi dan nilai tukar. Dalam rangka mencapai kestabilan tersebut, BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan, termasuk suku bunga BI Rate, yang mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan. BI juga memainkan peran penting dalam mengawasi sektor perbankan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Melalui pemantauan dan penelitian, BI dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan dan bertindak sebagai jaring pengaman sistem keuangan sebagai lender of the last resort (LoLR).

Peralihan sebagian fungsi pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adaptasi BI terhadap perkembangan industri jasa keuangan dan kebutuhan pengawasan yang lebih spesifik. Kolaborasi antara BI dan OJK diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sistem keuangan Indonesia. Stabilitas sistem keuangan juga sangat bergantung pada kinerja sektor perbankan. Melalui berbagai reformasi dan kebijakan, BI berupaya menjaga kestabilan ini, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, BI tidak hanya bertugas menjaga kestabilan moneter tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, BI berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kerjasama dengan OJK dan berbagai lembaga terkait lainnya, BI terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global dan tantangan domestik yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, dkk. "Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2023): 56-62.
- Alamsyah, Halim. "Restrukturisasi Perbankan Dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi Dan Pengendalian Moneter." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 1, no. 3 (2003): 121-145.
- Andriani, Fani, and Roni Mohamad. "Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil." *Jurnal Ekonomi SYariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 3, no. 1 (2022): 1-15.
- Ichwani, Tia, Rika Kaniati, and Hikmatul Husna. "Analisis Kinerja Bank Indonesia Sebagai Stabilisator Inflasi Dan Kurs Rupiah Di Bidang Moneter." *Journal of Applied Business and Economics* 4, no. 3 (2018): 250-265.

- Jumiati, Eti. "Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral)." *Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022): 1-14.
- Kunaifi, Aang, and Abd Rosyid. "Pascapandemi, Bagaimana Efektifitas Kebijakan Quantitative Easing (QE)?: Konsep Sistem Moneter Islam Dalam Menstabilkan Ekonomi." *Istithmar* 7, no. 2 (2024).
- Permana, Yunan Hendra, Nur'aeni Nur'aeni, and Setiawan Setiawan. "Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter." *Jurnal Dimamu* 1, no. 2 (2022).
- Rahadiyan, Inda, and Alfhica Rezita Sari. "Peluang Dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Defendonesia* 4, no. 1 (2019): 18-28.
- Saridawati, (Akademi Manajemen Keuangan BSI Jakarta). "Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia (Bi) Rate Terhadap Nilai Tukar Us\$ Dan Inflasi." *Moneter* II, no. 1 (2015).
- Sitepu, Novi Indriyani. "Peran Bank Syariah Dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017).
- Suhartono, S. "Peran Bank Sentral Dalam Stabilitas Sistem Keuangan." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 13, no. 3 (2009).
- Vany Akselia Malau, Eva, Kristian Reinhart Simamora, Roy Andi Syaputra Hia, Dirga Ardian Syahputra, Miftahul Jannah, Dewi Mahrani Rangkyu, Jl KM Jend Gatot Subroto, and Sei Sikambing Medan Sumatera Utara. "Studi Kajian Indikator Moneter Dalam Memperkuat Stabilitas Ekonomi." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 1, no. 3 (2023).